



Analysis of the Implementation of Regional Regulation No. 07 of 2017 concerning Street Children, Homeless and Beggars In Bengkulu City

Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bengkulu



Dimas Nugroho^a
Mulyadi^b
Budiman Sakti^c
Heru Purnawan^d

Article history:

Submitted: 15 April 2022

Revised: 16 May 2022

Accepted: 14 June

Keywords:

Implementation, Street Children, Homeless and Beggars

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation of regional regulation (PERDA) no. 07 of 2017 about street children, homeless people and beggars in Bengkulu City. This study uses a qualitative descriptive method with data analysis techniques of observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Bengkulu City Social Service, members of the Satpol, beggars, vagrants. Based on the results of the study, it can be concluded that communication has shown optimal results based on the fact that the research conducted has not been optimal in terms of transmission, clarity, and consistency when delivering information to policy implementers. Resources also show optimal results where aspects, information, authority are categorized as maximum, but for the aspect of facilities it is maximal because there are still many facilities needed or updated for parking attendants on duty and there are still frequent rejections from residents in terms of opening new parking lots and the staff aspect is still said not to be optimal because there are still many illegal parking found. Disposition Showing the results that are less than optimal, it can be seen that the lack of facilities that support the implementation of the program. The bureaucratic structure is categorized as optimal based on research conducted with several informants saying that it is optimal in terms

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

^d Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

of work guidelines based on SOPs that are easily understood by policy implementers and carry out well.

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah (PERDA) No. 07 tahun 2017 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Bengkulu, Anggota Satpol, Pengemis, Gelandangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah belum optimal ditinjau dari segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada saat penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan. Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namun untuk aspek fasilitas sudah maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui untuk juru parkir dalam bertugas dan masih seringnya terjadipenolakan dari warga dalam hal membuka lahan parkir baru dan pada aspek staf masih dikatakan belum optimal dikarenakan masih banyaknya ditemukan parkir ilegal. Disposisi memperlihatkan hasil yang kurang optimal terlihat bahwa kurangnya fasilitas sarana yang mendukung pelaksanaan program. Struktur birokrasi Terkategorikan optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan mengatakan sudah optimal ditinjau dari pedoman kerja berdasarkan SOP yang mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan melaksanakannya dengan baik.

Journal of Social Science and Humanities © 2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Heru Purnawan,

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, Indonesia

Email address: shane.purnawan@gmail.com

1 Pendahuluan

Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial memang pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan bagi Pemerintahan daerah. Sebagai mana negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, yang memiliki masyarakat dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Masalah kesejahteraan sering kali menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam pembangunan dengan membuat berbagai macam program untuk masyarakatnya. Menyelesaikan permasalahan sosial memang sangat kompleks, dibutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah Provinsi dan Daerah, Kabupaten/Kota.

Arthur Dunham dalam Sukoco (1991) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan. Anak jalanan sebagai salah satu permasalahan sosial tidaklah lepas dari peran Pemerintah. Peran yang seharusnya, yang memelihara itu bukan hanya pemerintah, tetapi juga DPRD sebagai lembaga legislatif penentu kebijakan dalam bentuk undang-undang.

Pemerintah menjalankan tugas pemeliharaan fakir, miskin, dan anak terlantar itu tergantung kepada apa yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, yang pertama harus dipastikan adalah pengaturan dalam undang-undangnya harus benar-benar mencerminkan perintah konstitusi agar fakir miskin, dan anak terlantar dapat diperlihara dengan baik.

Penanganan permasalahan sosial yang tidak tuntas dapat memunculkan masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, terlihat dari banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan mengenai kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif, salah satunya ialah dengan adanya Gelandangan dan Pengemis.

Dalam relasi kekuasaan, ketidaksesuaian antara perilaku gelandangan dengan perilaku dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjadikan gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai perilaku devian/ menyimpang, yaitu orang tertentu dengan perilaku menyimpang. Pemerintah mengkategorikan gelandangan dan pengemis sebagai kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Setelah pembuatan kebijakan, proses terpenting ialah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Proses ini akan menjadi parameter apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Untuk itulah peran dari implementer sangat mempengaruhi output dan outcome dari sebuah penerapan kebijakan.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi yaitu, Analisis Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bengkulu.

1. Peraturan daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

2. Anak Jalanan

Menurut Ishaq (2000:16), ada tiga kategori anak jalanan, yakni: (1) mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

3. Gelandangan

Menurut Twikromo (1999:6), gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya. Semakin banyaknya gelandangan merupakan contoh yang ada saat ini bahwa kemiskinan adalah faktor utama yang paling berpengaruh dan mendasari kenapa masalah sosial ini terjadi, apalagi fenomena sosial ini banyak kita temukan di perkotaan.

4. pengemis

Menurut Depsos (2002:4), pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

5. Implementasi

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi,

sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

2 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisa data Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Fokus penelitian adalah menganalisis Perda No 07 Tahun 2017 tentang anak jalanan. Penelitian ini membutuhkan informasi beberapa pihak, yakni Dinas Sosial Kota Bengkulu, Anggota Satpol, Pengemis, Gelandangan.

3 Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi ini merupakan suatu penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi sangat diperlukan, baik itu dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap informan penelitian maka bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan parkir sudah sesuai.

2. Sumber daya

Sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting didalam membangun sebuah organisasi. Menurut Faustino C.G (65:2013) menjelaskan bahwa sumberdaya manusia merupakan salah satu sumberdaya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa sumberdaya merupakan satu hal yang sangat penting demi kemajuan suatu program atau organisasi. Karena dengan adanya sumberdaya yang mengelola program dengan baik maka program tersebut bisa berjalan dengan baik. Setelah program berjalan dengan sebagaimana mestinya maka semua aspek yang terkait akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Dari beberapa pernyataan yang diberikan oleh informan, bisa kita lihat bahwa dari segi sumberdaya manusia merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu program yang dijalankan. Kemudian tidak lupa pula adanya sarana prasarana yang membantu dalam mensukseskan suatu program.

3. Disposisi

Berdasarkan pada pengamatan, bahwa secara umum implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan perbaikan untuk memenuhi harapan atau program yang sudah direncanakan. Bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum Kota Bengkulu masih perlu penyempumaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau gagal, pada dasarnya ditentukan oleh proses implementasinya.

4. Struktur Organisasi

Didalam hal mencari tahu bagaimana pandangan tentang struktur birokrasi, terlebih dahulu kita harus melihat beberapa pandangan struktur birokrasi. Seperti teori yang dikemukakan oleh Webber (54:2007) menjelaskan bahwa pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam hubungan kerja yang berjenjang serta mempunyai prosedur dalam suatu tatanan organisasi. Kemudian pandangan yang dikemukakan oleh Kumartono (61:2007) untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan harapan maka birokrasi perlu dilengkapi dengan personalia yang profesional dengan spesialisasi yang bagus dan aturan yang cukup baik, namun struktur yang mendasarinya tidak rasional.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Komunikasi sudah memperlihatkan hasil yang optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan sudah belum optimal ditinjau dari segi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada saat penyampain informasi kepada para pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya juga memperlihatkan hasil yang optimal dimana aspek, informasi, wewenang dikategorikan maksimal, namun untuk aspek fasilitas sudah maksimal dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang dibutuhkan atau diperbaharui untuk juru parkir dalam bertugas dan masih seringnya terjadi penolakan dari warga dalam hal membuka lahan parkir baru dan pada aspek staf masih dikatakan belum optimal dikarenakan masih banyaknya ditemukan parkir ilegal.
3. Disposisi memperlihatkan hasil yang kurang optimal terlihat bahwa kurangnya fasilitas sarana yang mendukung pelaksanaan program.
4. Struktur birokrasi terkategori optimal berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan mengatakan sudah optimal ditinjau dari pedoman kerja berdasarkan SOP yang mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan melaksanakannya dengan baik

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, maka penulis dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

1. Bahwa tindakan anak jalanan tidak cenderung dititik beratkan pada upaya pemberdayaan langsung kepada anak, melainkan intervensi juga terhadap keluarga atau orang tua anak jalanan mengingat latar belakang keluarga mereka adalah miskin. Sehingga dipandang perlu untuk mendapat bantuan pemberdayaan keluarganya.
2. Pemerintah dan Instansi terkait harus segera memiliki data base anak jalanan, untuk dapat menjadi data dan informasi guna kepentingan perencanaan dan tindakan bagi yang berkepentingan.
3. Pemerintah Daerah segera memfasilitasi terbentuknya Tim Terpadu, instansi terkait dan pihak-pihak peduli untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan secara bersama-sama, sehingga tindakan yang dilakukan akan mempunyai dimensi yang luas, baik aspek sosial, agama, pendidikan, ekonomi, hukum dan keamanan.
4. Organisasi Sosial dan Pendamping/ Relawan Sosial untuk lebih ditingkatkan kepeduliannya terhadap upaya-upaya pendampingan yang dilakukan, mengingat ancaman resiko anak jalanan terlalu besar yang harus mereka hadapi, seperti kriminalitas, sexualitas, eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang, dan lain-lain.
5. Pemerintah Daerah segera lebih lanjut mengkaji lahirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Penanganan Anak Jalanan dengan pelibatan semua pihak, dari akademisi, masyarakat, politisi, aktivis dan anak jalanan itu sendiri
6. Masyarakat untuk segera merubah prilaku selama ini untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan. Akan lebih baik masyarakat menyalurkan melalui lembaga resmi milik Pemerintah atau lembaga resmi yang menangani anak jalanan.

5 Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solihin. 2010. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bajari, Atwar. 2012. *Anak Jalanan, dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Jalanan Menyimpang*. Bandung: Humaniora.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Pasolong, Harbani. 2010. *Terori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Perda. No 07 Tahun 2017 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bengkulu

UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah

<https://prezi.com/8tsrgun8p3lv/masalah-sosial-anak-jalanan-pengamen/>

<https://penanegeri.com/latar-belakang-anak-jalanan-dampak-yang-ditimbulkan-dan-solusinya/4051/>